



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KANGEAN
Nomor : W13-A36/393a/OT.00/SK/XI/2017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA KANGEAN

KETUA PENGADILAN AGAMA KANGEAN

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014;
2. Bahwa dalam rangka menindak lanjuti Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Kangean Tahun 2015-2019 sehingga dapat tercapai sasaran mutu yang diinginkan perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kangean;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009.

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
10. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 Nopember 2016 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU).

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 28 Nopember 2017 tentang Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kangean Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KANGEAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA KANGEAN**

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kangean Nomor : W13-A36/64/OT.00/SK/I/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kangean;

Kedua : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kangean Nomor : W13-A36/393a/OT.00/SK/XI/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kangean;

- Ketiga** : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Pengadilan Agama Kangean untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen Penetapan Kinerja Tahunan (PKT), dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019;
- Keempat** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja ini disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kangean
Pada tanggal : 29 Nopember 2017
Ketua,

Drs. H. IMAM FAROK, M.HES
NIP. 196811201994031004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KANGEAN
Nomor : W13-A36/295/OT.00/SK/VII/2019
TENTANG
TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA KANGEAN

KETUA PENGADILAN AGAMA KANGEAN

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014;
2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Kangean Tahun 2015-2019 sehingga dapat tercapai sasaran mutu yang diinginkan perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama;
3. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kangean;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

- 10 Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 11 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014
- 12 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 Nopember 2016 tentang Tim Reviu Indikaor Kinerja Utama.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Tanggal 23 Juli 2019 tentang Pembahasan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kangean Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KANGEAN TENTANG TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA KANGEAN**
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kangean Nomor : W13-A36/394/OT.00/SK/XI/2017 tentang Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kangean;
- Kedua** : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kangean Nomor : W13-A36/295/OT.00/SK/VII/2019 tentang Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kangean;
- Ketiga** : Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan Tim kerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Kangean, untuk me-Revui Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Keempat** : Penyusunan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ini disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kangean
Pada tanggal : 24 Juli 2019
Ketua,

H. MOH. MUJTABA, S.Ag, S.H, M.H.
NIP. 19730321 199903 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Kangean
Nomor : W13-A36/295/OT.00/SK/VII/2019
Tanggal : 24 Juli 2019

1. Penanggung Jawab : **H. Moh. Mujtaba, S.Ag., S.H., M.H.**
Ketua Pengadilan Agama Kangean
2. Pengarah : **Moh. Lutfi Amin, S.H.I.**
Hakim Pengadilan Agama Kangean
3. Koordinator : **H. Samsul Hudha, S.H.**
Plt. Panitera Pengadilan Agama Kangean
: **Ahdiyati Ilmawan Nehru, S.H.I., M.H.**
Sekretaris Pengadilan Agama Kangean
4. Koordinator Kepaniteraan : **M. Ridwan, S.H.**
Panitera Muda Hukum
Anggota : **Mashar, S.H.**
Panitera Muda Permohonan
: **SF. Hatija, S.Ag.**
: **Siti Amna**
: **Miftahorrahman**
: **Syukri Amin**
5. Koordinator Kesekretariatan : **Rusdi Isnaini Yulkhamsyah, S.HI, M.H.**
Kasubbag Kepegawaian, dan Tata Laksana
Anggota : **Fauzin Rifai, S.H.**
Kasubbag Umum dan Keuangan
: **Moh. Hosni AS**
: **Abdul Gafur Halil, S.PdI**
: **Rony Ferliansyah**

Ditetapkan di : Kangean
Pada tanggal : 24 Juli 2019
K E T U A,

H. MOH. MUJTABA, S.Ag, S.H, M.H.
NIP. 19730321 199903 1 003

KATA PENGANTAR

Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja, serta usaha penguatan akuntabilitas kinerja, maka dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kangean sebagai Lembaga Instansi Pemerintah dibawah Mahkamah Agung RI. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, guna memenuhi target akuntabilitas kinerja yang lebih baik sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Pengadilan Agama Kangean menyusun serta kemudian menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun 2019 ini untuk selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Kangean.

Indikator Kinerja Utama suatu Instansi adalah hal yang paling utama untuk mengetahui, mengapa dan untuk apa sebuah Instansi Pemerintahan itu dibentuk, hal itulah yang menjadi *Core Business* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama Instansi Pemerintah.

Semoga dengan ditetapkannya Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kangean pada tahun 2019 ini, tugas dan fungsi serta wewenang Pengadilan Agama Kangean dapat berjalan dengan baik

serta dapat bermanfaat bagi seluruh *stakeholder*, masyarakat pencari keadilan, serta berguna bagi semua pihak yang terkait.

Kangean, 30 Januari 2020

Ketua Pengadilan Agama Kangean

H. MOH. MUJTABA, S.Ag. SH. MH

NIP. 19730321 199903 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i-ii
DAFTAR ISI	iii
Bab I Pendahuluan	1
<i>Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Sesuai dengan PERMEN PAN Nomor 09 Tahun 2007</i>	
Bab II Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kangean	7
<i>Pada bab ini diuraikan dan dijelaskan isi dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kangean.</i>	
Bab III Penutup	11
LAMPIRAN	
1. Matrik Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kangean	
2. Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan Agama Kangean tentang Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU).	
3. Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan Agama Kangean tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	

BAB I

PENDAHULUAN

Menurut PERMEN PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungannya masing-masing dengan tujuan sebagai berikut :

- 1). Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- 2). Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan instansi masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena sering kali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi dengan instansi di atasnya.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan disetiap Instansi pemerintah, yang meliputi Kementerian Koordinator / Kementerian Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Jenderal Lembaga Tinggi Negara, dan Lembaga

Lain yang menjalankan fungsi pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu diperlukan kordinasi yang baik di dalam tubuh instansi tersebut sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama dapat dilaksanakan dengan baik dan penerapannya dilakukan secara integratif diantara unit kerja didalamnya.

Indikator Kinerja Utama instansi pemerintah harus selaras antara tingkat unit organisasi. Cakupan Indikator Kinerja Utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi Indikator Kinerja Keluaran (*Output*) dan hasil (*Outcome*) dengan tatanan sebagai berikut :

- 1). Indikator Kinerja Utama pada tingkat Kementerian Negara/Departemen/LPND/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota sekurang kurangnya adalah Indikator Hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;
- 2). Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah Indikator hasil (*Outcome*) dan atau keluaran (*Output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya;
- 3). Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi setingkat Eselon II / Satuan Kerja/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Selanjutnya berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam penetapan Indikator Kinerja Utama, maka setingkat eselon I ada beberapa aturan yang harus diikuti, yaitu :

- 1). Menteri / Pimpinan Lembaga wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Kementerian Koordinator / Departemen / Kementerian Negara / Lembaga dan Unit organisasi setingkat eselon I serta unit kerja mandiri dibawahnya.
- 2). Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga lain yang menjalankan fungsi pemerintahan wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Lembaga Tinggi Negara, Lembaga lain, dan unit organisasi setingkat eselon I serta unit kerja mandiri dibawahnya.
- 3). Gubernur/Bupati/walikota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) serta unit kerja mandiri dibawahnya.

Untuk tingkat unit kerja, indikator kinerja yang digunakan harus lebih rinci dan spesifik, namun tetap harus diperhatikan keselarasan dan keseimbangannya dengan Indikator Kinerja unit-unit kerja lainnya serta dengan tingkat instansi pemerintah. Dengan demikian, mulai dari bagian terkecil suatu organisasi sampai bagian terbesarnya sejak awal sudah selaras satu sama lain, sehingga perencanaan instansi sampai perencanaan nasional dapat tercapai.

Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama adalah :

- 1). Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah, Rencana Startegis, Kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan.
- 2). Bidang Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran lainnya.
- 3). Kebutuhan Informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.
- 4). Kebutuhan data statistik Pemerintah.
- 5). Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam pemilihan dan penetapan kinerja utama dilingkungan instansi pemerintah hendaknya melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari intansi yang bersangkutan. Selain itu indikator kinerja utama yang ditetapkan harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan. Pada PERMEN PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

- 1). Spesifik
- 2). Dapat dicapai
- 3). Relevan
- 4). Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur
- 5). Dapat dikualifikasi dan diukur

Indikator Kinerja Utama merupakan suatu ukuran yang sangat penting dalam pencapaian kinerja instansi pemerintah. Dilingkungan instansi pemerintah, Indikator Kinerja Utama dapat digunakan untuk beragam kepentingan, yaitu :

- 1). Perencanaan jangka menengah
- 2). Perencanaan tahunan
- 3). Penyusunan dokumen penetapan kinerja
- 4). Pelaporan akuntabilitas kinerja
- 5). Evaluasi kinerja instansi pemerintah
- 6). Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Instansi pemerintah dalam melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja harus memperhatikan capaian Indikator Kinerja Utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi tersebut perlu dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada, baik berupa kendala, hambatan, maupun informasi lainnya.

Indikator Kinerja Utama sebagai patokan keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu disusun, diantaranya untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas kerja suatu instansi pemerintah. Oleh karenanya membutuhkan kecermatan agar Indikator Kinerja Utama memenuhi kriteria validitas dan realibilitas sesuai dengan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Penetapan

Indikator Kinerja Utama, pada dasarnya melalui beberapa tahapan, mulai dari pengkajian beragam referensi maupun dokumen, penyusunan, hingga penetapan dan pengesahan Indikator Kinerja Utama.



BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kangean Tahun 2019 ini, Pengadilan Agama Kangean telah mengadakan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama yang telah disusun sebelumnya, yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kangean Nomor : W13-A36/64A/OT.00/SK/I/2017, tanggal 10 Januari 2017. Kemudian Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kangean direviu kembali dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama nomor : W13-A36/393/OT.00/SK/XI/2017 tanggal 29 Nopember 2017, adalah hasil dari diklat dan pembelajaran Tehnis Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Diklat Hukum dan Peradilan (BALITBANG DIKLAT KUMDIL) Mahkamah Agung RI di Surabaya pada tanggal 29 Oktober – 03 Nopember 2017 yang materinya telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007.

Pengadilan Agama Kangean dalam menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama ini telah melakukan analisa secara komprehensif, baik yang berkaitan dengan kinerja keluaran (*Output*) dan juga hasil (*Outcome*). Sehingga tugas dan fungsi serta wewenang Pengadilan Agama Kangean sebagai Institusi Pemerintah dapat berjalan sesuai dengan

core business nya yakni memberikan pelayanan yang baik dan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Dalam perumusan Indikator Kinerja Utama Pengadilan agama Kangean, terdapat lima tema pokok yang digunakan untuk menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

- 1). Kinerja Utama
- 2). Indikator Kinerja
- 3). Penjelasan
- 4). Penanggung Jawab, dan
- 5). Sumber Data

Didalam tema pokok **Kinerja Utama** ada 4 (empat) poin Kinerja Utama yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kangean yakni :

- 1). Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.
- 2). Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
- 3). Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
- 4). Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Kemudian pada tema pokok **Indikator Kinerja**, Pengadilan Agama Kangean menggunakan sub pokok Indikator yang sudah digunakan di tahun-tahun sebelumnya. Dalam sub pokok Indikator Kinerja ini menggunakan persentase keberhasilan Pengadilan Agama Kangean dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam menangani perkara dari tahun sebelumnya. Dari Indikator Kinerja inilah Pengadilan Agama Kangean dapat menganalisa serta mengevaluasi keberhasilannya dalam melaksanakan wewenangnya sesuai dengan *Core Business* yang sudah ditetapkan. Sedangkan pada tema pokok **Penjelasan**, dijelaskan tentang perbandingan Persentase keberhasilan dari tahun-tahun sebelumnya, apakah Persentase itu menurun, atau bahkan naik dari sebelumnya. Pada tema pokok **Penanggung Jawab**, dijelaskan tentang penanggung jawab data atas isi dari sub pokok Indikator Kinerja serta sub pokok Penjelasan. Sedangkan dalam tema pokok **Sumber Data**, menjelaskan tentang dari mana sumber data untuk mengetahui isi dari sub pokok Indikator Kinerja dan sub pokok Penjelasan.

Dibawah ini adalah Matriks Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kangean :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA KANGEAN PADA TAHUN 2019

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan	X 100%	Panitera Pengadilan Tingkat	Laporan Bulanan dan Laporan
			Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan			
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan	X 100%	Panitera Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Jumlah perkara yang ada			
		Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{Tn-1-Tn}{Tn-1} \times 100\%$	Panitera Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = sisa perkara tahun sebelumnya						
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	X 100%	Panitera Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan		
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan		Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan		
2	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu	X 100%	Panitera Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Jumlah Putusan			
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui	X 100%	Panitera Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi			
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap	Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK secara lengkap	X 100%	Panitera Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan		
	Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum					
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diumumkan	Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website	X 100%	Panitera Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan		
	Jumlah putusan perkara					
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	X 100%	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan
			Jumlah perkara prodeo			
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	X 100%	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan			
Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	Jumlah perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan	X 100%	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan		
	Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan					
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan bantuan Hukum	X 100%	Panitera Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan		
	Jumlah pencari keadilan golongan Tertentu yang mendapatkan layanan bantuan Hukum					
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti	X 100%	Panitera Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Jumlah Putusan perkara yang sudah BHT			

BAB III

PENUTUP

Atas Berkah dan Rahmat Allah SWT, maka Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kangean tahun 2019 ini dapat disusun dan ditetapkan, sesuai dengan Indikator Kinerja dan Sasaran kinerja keluaran (*Output*) dan juga hasil (*Outcome*) secara komprehensif.

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kangean pada Tahun 2019 ini, menyajikan target strategis yang akan dicapai dan dilaksanakan. Serta sebagai landasan kerja untuk mengukur keberhasilan, selain itu juga untuk dijadikan bahan penyusunan Rencana Strategis 2015-2019, Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2020 dan 2021, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020, Rencana Aksi Kerja Tahun 2020, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kangean pada tahun 2019 ini, diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan semoga dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Swt. Aamiin ya robbal alamiin.

Demikianlah Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kangean pada tahun 2019 ini kami susun dan kami tetapkan, semoga dapat meraih sasaran keberhasilan yang akan dicapai

baik itu *Output* maupun *Outcome* nya sesuai dengan *Core Business* Pengadilan Agama Kangean.



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA KANGEAN PADA TAHUN 2019

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$	Panitera Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{\text{Tn.1-Tn}}{\text{Tn.1}} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 =sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan	Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan.
2	Meningkatnya Efektivitas	Persentase Isi putusan yang	Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu	Panitera	Laporan Bulanan

Pengelolaan Penyelesaian Perkara	diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Putusan}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$	Pengadilan Tingkat Pertama	dan Laporan Tahunan.
	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$	Panitera Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan bantuan Hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan Tertentu yang mendapatkan layanan bantuan Hukum}} \times 100\%$	Panitera Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$	Panitera Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.